

346.074  
WAH  
R



DAMPAK PELAKSANAAN KONTRAK ARENDS BAGI  
PETANI DI DAERAH SIDOARDJO PADA AWAL  
ABAD XX

Oleh:

Drs. S. Sigit Wahyudi, MS

FAKULTAS: Sastra  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

---

Dibiayai oleh Dana DPP Universitas Diponegoro Semarang,  
Tahun Anggaran 1994 / 1995, berdasarkan Surat Perjanjian  
Pelaksanaan Tugas Penelitian Universitas Diponegoro, No:  
615/PT09.H8/N/1994 Tanggal 23-8-1994

LEMBAGA PENELITIAN UNDIP

1995

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Dampak Pelaksanaan Kontrak Arends Bagi Petani di Daerah Sidoardjo Pada Awal Abad XX

2. Kepala Proyek Penelitian :

- a. Nama lengkap : Drs. S. Sigit Wahyudi, MS.  
b. Pangkat dan jabatan : Penata Tk.1 / Gol. III D  
c. Pengalaman dalam bidang penelitian : ( lihat lampiran ).  
d. Sedang mengadakan penelitian : Tidak  
e. Tempat Penelitian :  
- Sidoardjo  
- Arsip Nasional RI Jakarta.  
- Perpustakaan Nasional RI.

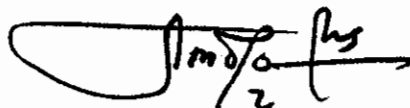
3. Jangka waktu penelitian : 6 bulan

4. Dibiayai melalui proyek : DPP Universitas Diponegoro tahun 1994/1995.

5. Biaya yang diperlukan : Rp 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

Semarang, 31 Januari 1995

Ketua Peneliti,



Drs. S. Sigit Wahyudi, MS

NIP: 131 285 526

Mengetahui:

Pembantu Dekan I Sastra UNDIP

Drs. Moehadi

NIP: 130205425



Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian UNDIP,

Dr. dr. Ag. Soemantri H

NIP: 130 237 480



## RINGKASAN

Pada awal abad XX di wilayah Sidoardjo, residen-  
si Surabaya merupakan perkebunan tebu dengan 15 pabrik  
gulanya. Pabrik gula pada saat itu merupakan tulang  
punggung perekonomian pemerintah Hindia Belanda, sebab  
gula sebagai primadona ekspor yang dapat menghasilkan  
keuntungan yang sangat besar.

Dalam menjamin adanya kepastian hukum dan kewan-  
tapan dalam perluasan areal perkebunan tebu, pemerin-  
tah perlu membuat aturan tentang kontrak yang mengatur  
persewaan tanah. Kontrak itu dicanangkan oleh pemerin-  
tah di bawah anjuran seorang residen L.A Arends, maka  
perjanjian itu dikenal dengan nama Kontrak Arends yang  
tertuang dalam Staadblad No. 240. Isi kontrak ini se-  
benarnya berisi aturan yang sangat menguntungkan peta-  
di dalam meringankan pembayaran pajak di luar campur  
tangan aparat tradisional. Namun dalam pelaksanaannya  
mendapat campur tangan aparat tradisional terutama lu-  
rah. Mereka sebagai pemeran ganda yang tentu saja me-  
ngakibatkan kemiskinan dan penderitaan petani.

Walaupun perkebunan tebu dan pabrik gulanya te-  
lah mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi peme-  
rintah Hindia Belanda, namun kehadirannya selalu bera-  
kibat buruk bagi masyarakat di sekitarnya dan petani  
akan menjadi korbannya. Sangatlah pantas apabila pere-  
konomian petani di daerah Sidoardjo adalah semu, sebab  
dari luarnya nampak makmur namun kehidupannya sangat di-  
tentukan oleh nilai kredit. Bagaimana dikatakan makmur  
kalau sepertiga dari tanah garapannya selalu disewakan  
kepada pabrik terus menerus, apalagi kebahagiaan untuk  
makan setiap haripun merasa susah.

## SUMMARY

In the early 20 th century in Sidoardjo area, Surabaya residence was a sugercane plantation with its 15 suger factories. At that time, suger faktori- es were the backbone of Dutch colony's economy, since suger as a prime export could make considerable profits.

To guarantee the legal certainty and stability for extending sugercane plantation areas, the colonial goverment needed to make contract rules regulating land leases. The contract was issued by the goverment based on a Surabaya resident's recommendati- on, L.A. Arends, so the contract was known as Arends contract, expressed in Staadblad No. 240. The con- tract contained rules which were benefecial for pe- asant in reducing tax payment out of the traditional officer, aspecially lurah ( village chiefs ) inter- vened the tax payment. As double blakmailers, they couosed poverty and suffering for the peasants.

Eventhough the sugercane plantation and its suger industries had given a lot of profits for the Dutch colony, its presence always made the people around the peasants suffer. It would be appropriate to say that the peasant's economy in Sidoardjo was false, because the peasants seemed prosperous from outside, but their life actually depended on credit value.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt., yang telah memberikan ijin dan ridlonya dalam penggarapan penelitian yang berjudul "Dampak Pelaksanaan Kontrak Arends Bagi Petani di Daerah Sidoarjo Pada Awal Abad XX". Saya sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, sarana dan prasarana.

Selama pengumpulan data, informasi, dokumen atau dalam studi leteratur dalam penelitian ini tentunya banyak membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas kesemuanya ini, maka tidak lupa saya ucapkan terima kasih tada terhingga kepada:

1. Lembaga penelitian Universitas Diponegoro yang telah memberikan dana, bimbingan dan kesempatan dalam penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Sastra yang telah memberikan dorongan moral dan spiritual dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Pimpinan dan staf baik Arsipnas RI dan Pustakana RI di Jakarta.
4. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu - persatu.

Saya hanya dapat mengharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

Semarang, 31 Agustus 1995

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL . . . . .	i
HALAMAN PENGESAHAN . . . . .	ii
RINGKASAN . . . . .	iii
SUMMARY . . . . .	iv
KATA PENGANTAR . . . . .	v
DAFTAR TABEL . . . . .	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah . . . . .	1
B. Tinjauan Pustaka . . . . .	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian . . . . .	5
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Teori dan Pendekatan . . . . .	6
B. Scope Spasial dan Temporal . . . . .	6
BAB III. HASIL DAN BAHASAN	
A. Keadaan Geografis . . . . .	7
B. Sistem Perekonomian Penduduk . . . . .	8
C. Kontrak Arends dan Dampaknya Terhadap Petani . . . . .	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan . . . . .	20
B. Saran-Saran . . . . .	21
DAFTAR PUSTAKA . . . . .	22
LAMPIRAN . . . . .	28

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir abad XIX bagi sejarah masyarakat di Indonesia, mengalami abad perubahan yaitu berubahnya masyarakat Indonesia dari sifat tradisional ke bentuk masyarakat modern. Proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan di pedesaan Jawa. Berbagai perubahan yang terjadi antara lain proses lenyapnya berbagai institusi tradisional dan munculnya institusi sosial baru hingga awal abad XX.

Berbagai perubahan yang terjadi dikarenakan diberlakukannya intensifikasi politik kolonial Belanda melalui proses birokratisasi, komersialisasi, industrialisasi, edukasi, inovasi dan renovasi pertanian yang berakibat bagi daerah pedesaan. Terjadi perubahan di sektor kehidupan pertanian yang bersifat sistemik melalui kebijakan ekonomi ke arah produksi yang kapitalis ( Immanuel Wallerstein: 1977, 74-75 ). Berbagai perubahan sosial itu terjadi karena munculnya kondisi sosial baru dalam masyarakat karena berbagai faktor: ( W.F. Wertheim: 1956, 38-50 ). Walaupun pembaharuan ini terjadi terutama di Jawa, namun hal tersebut merupakan awal bagi beberapa bagian kepulauan di Indonesia ( Anne Booth dan William J.O, Malley: 1988, 197 ).

Melalui perubahan sistem pertanian yang bersifat subsistensi ke arah sistem pertanian yang mampu mengekspor hasil-hasil pertanian, maka perkebunan merupakan aspek yang terpenting untuk dibicarakan dalam konteks perubahan tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan perekonomian di Wilayah Hindia Belanda saat itu khususnya di daerah Sidoardjo, residensi Surabaya. Berbagai tanaman agro industri yang sedang berkembang itu, perkebunan

tebu merupakan primadona ekspor yang dapat membawa keuntungan finansial bagi pemerintah Hindia Belanda. Namun dengan meluasnya jaringan perkebunan tebu dan berdirinya berbagai pabrik gula di daerah - daerah , ternyata berakibat buruk bagi daerah-daerah sekitarnya. Tanpa dukungan tanah dan tenaga kerja, perkebunan tebu dan pabrik gula ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam merekrut tanah dan tenaga kerja ini pihak onderneming terpaksa harus bekerjasama dengan para penguasa tradisional. Maka antara onderneming dengan kaum feodal pribumi ini terjadilah hubungan yang sangat menguntungkan yang disebut hubungan simbiose - mutualistis. Inipun nampaknya tidak cukup menjamin kepentingan pemerintah Hindia Belanda, maka perlu dibuat aturan untuk menegakan kewibawaan pemerintah dan kepastian hukum dalam sewa-menywa tanah untuk areal perkebunan misalnya dengan sistem Kontrak Arends ini.

Hubungan simbiose mutualistis ini ternyata berakibat makin menguatnya sistem feodal, meskipun beamtenstaat yang merupakan instrumen bagi tuntutan birokrasi pemerintah kolonial juga memperlihatkan bahwa semua kebijakan yang diarahkan bagi kepentingan eksploitasi agraris itu merupakan periode kolonial yang sempurna apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya ( G.J Resink: 1968, 103-105 dan S. Sigit Wahyu - di: 1993, 4 ). Di daerah pedesaan Jawa nampak sekali bagaimana posisi lurah yang sebelumnya berfungsi sebagai primus inter pares kemudian berubah menjadi alat dan kaki tangan termasuk kepentingan perkebunan tebu dan pabrik gulanya untuk selalu mengusahakan tanah dan tenaga kerja yang murah bagi berlangsungnya kehidupan perekonomian perkebunan ( Loekman Soetrisno: 1986, 3-4 ).



Penelitian ini berjudul, Dampak Pelaksanaan Kontrak Arends Bagi Petani di Daerah Sidoardjo Pada Awal Aabad XX. Permasalahan yang timbul adalah, mengapa daerah Sidoardjo yang relatif subur yang di tandai dengan padatnya penduduk, pengairan teknis yang sangat teratur dari sungai Brantas, tanahnya subur sehingga kegagalan panen jarang terjadi, sarana transportasi baik sekali, namun terjadi kemiskinan ? . Maka hipotesa sementara yang dapat ditarik adalah hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gulanya yang merupakan sarana eksploitasi dari pemerintah Hindia Belanda.

#### B. Tinjauan Pustaka

Penelitian menggunakan sumber-sumber tertulis baik yang bersifat primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan langsung atas kejadian, sedangkan sumber sekunder adalah sejumlah karya sejarah yang menceritakan peristiwa Sidoardjo berdasarkan sumber primer. Banyak buku-buku yang relevan dan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama buku karangan James C. Scoot, yang berjudul Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Buku ini sangat besar artinya bagi penulisan ini terutama dalam kaitannya untuk memahami perilaku ekonomi petani. Oleh James C. Scoot digambarkan bahwa petani adalah merupakan konsumen subsistensi yang taraf kehidupannya selalu berada diambang baik menyangkut permasalahan makanan, pakaian atau tempat tinggal. Menurutnya bahwa setiap bentuk eksploitasi atau tindakan perampasan milik mereka akan dapat mendorong timbulnya ketegangan yang berakhir pada

penberontakan ( James C. Scoot: 1983 ).

Buku kedua karangan Yijiro Hayami dan Masao Kikuchi berjudul, Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan kelembagaan di Asia . Uraian di dalamnya mengenai pelapisan sosial kemasyarakatan desa sebagai berikut: petani gogol adalah petani pemilik tanah baik sawah maupun pekarang. Mereka memiliki hak yang dimiliki oleh anggota komunitas dan mereka juga berkewajiban memikul semua beban. Kedua - petani stengah gogol, mereka memiliki pekarangan dan rumah tetapi tidak memiliki sawah. Ketiga yaitu kelompok orang menumpang, mereka hanya memiliki sawah . Terakhir kelompok wong nusup mereka tidak memiliki tanah, rumah dan sebagai pemondok di rumah orang lain. ( Yijiro Hayami dan Masao Kikuchi: 1987, 183-244 ).

Buku ketiga karangan Karl J. Pelzer, "The Agricultural Foundation" dalam Bruce Glassburner, (ed)., The Economy of Indonesia, dijelaskan pula bahwa setelah Undang-Undang Agraria 1890, setelah kapitalis - perkebunan berada dimana-mana di seluruh pelosok Jawa termasuk di daerah Sidoardjo maka pelapisan sosial yg berdasarkan pemilikan tanah itu semakin bergeser ke bawah dan sejumlah bukti memperlihatkan bahwa sejumlah anggota komunitas di desa Jawa yang tidak memiliki tanah dan hampir tidak memiliki tanah, semakin lama semakin bertambah. ( Karl J. Pelzer, "The Agricultural Foundation" dalam Bruce Glassburner (ed)., : 1971, 128-161 ).

Buku keempat karya S. Sigit Wahyudi yang berjudul Dampak Agroindustri Terhadap Persawahan di Jawa: Studi Kasus Gedangan Tahun 1904. Buku ini membahas bagaimana munculnya perubahan eksploitasi sosial ekonomi pada akhir abad XIX di Hindia Belanda termasuk sis -

tem persewaan tanah sejak jaman tanam paksa. Selanjutnya yang paling penting disini adalah membahas masalah perkebunan yang pernah menjadi andalan utama pemerintah Hindia Belanda ke pasaran Eropa, seperti tanaman kopi, teh, tembakau dan tebu. Dikatakan bahwa tanaman agroindustri tersebut dapat menghasilkan uang yang luar biasa yang dapat dipakai sebagai "gabus mengapung" perekonomian Hindia Belanda. Selanjutnya pada bab III dibahas pula mengenai bagaimana perkembangan perkebunan tebu dan pabrik gulanya, termasuk bagaimana sejarah tanaman tebu dan industri gulanya, munculnya sistem kerja bebas dan dinamika masyarakat perkebunan ( S. Sigit Wahyudi: 1983, 40-100 ).

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari perspektif sejarah, kontrak Arends merupakan kejadian yang unik dan bersifat lokal. Oleh karenanya peristiwa ini penting untuk diteliti. Pertama, pengungkapan sejarah yang bersifat mikro akan sangat berguna dalam memperluas cakrawala yang ada hubungannya dengan peristiwa lain baik masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Kedua, walaupun terjadi pada tingkat lokal namun kontrak Arends merupakan salah satu tatanan yang ingin mengangkat petani dari penderitaan pajak walaupun banyak di salahgunakan oleh penguasa pribumi. Melalui pengkajian yang intens terhadap berbagai sumber, diharapkan dapat dipahami sejumlah persoalan tentang masyarakat petani yang masih kurang dibicarakan sejak masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Pepatah mengatakan "petani merupakan soko guru revolusi". Ketiga, secara obyektif akan dapat diambil manfaatnya yang positif oleh para pemegang kebijakan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah tanah, perkebunan untuk mengurangi konflik.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode dalam penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian historis, maka kami akan menggunakan metode historis. Metode historis, menyangkut masalah heuristik, kritik, sinthesa dan penulisan. Metode ini berawal dari memilih subyek yang ditentukan, selanjutnya mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan. Sumber didapatkan pada perpustakaan milik pemerintah, perpustakaan pribadi yang berupa buku, majalah, surat kabar, surat dinas, surat pribadi dan dokumen ( Sartono Kartodirdjo: 1991, 45-47 ). Kritik dapat dibagi menjadi kritik intern dan ekstern, kritik intern untuk mendapatkan kredibilitas sumber dan kritik ekstern untuk mendapatkan outentisitas sumber. Selanjutnya diadakan sinthesa dari beberapa sumber yang telah terseleksi, dan yang terakhir mengadakan penulisan hasil penelitian ( Louis Gottschalk: 1986, 35 ).

Setiap penelitian atau penulisan sejarah perlu pembatasan skope spasial maupun temporal. Skope spasial menyangkut daerah bekas afdeling Sidoardjo, residensi Surabaya, Jawa Timur. Kata daerah ini menunjuk pada suatu kesatuan teritorial atau wilayah setingkat propinsi ke bawah ( Taufik Abdullah: 1979, 10-14 ). Sedangkan mengenai skope temporal menyangkut masalah waktu terjadinya peristiwa, yaitu pada awal abad XX atau tepatnya pd tahun 1904.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Keadaan Geografis.

Pada saat itu daerah Sidoardjo masih berstatus afdeeling atau setingkat kabupaten yang terletak kira-kira 18 km di sebelah selatan Surabaya. Sidoardjo meliputi wilayah atau distrik: Sidoardjo, Porong, Gedangan, Bulang dan Krian ( Lampiran 1 ). Di daerah ini merupakan daerah pertanian yang subur termasuk perkebunan tebu dan pabrik gulanya yang terdiri 15 pabrik gula dan mempunyai areal penanaman mencakup 9.000 hingga 10.000 bau untuk tanaman tebu. Pabrik gula itu seperti: Pening, Balongbendo, Kameraan, Ketegan, Waru, Sruni, Buduran, Japanan, Candi, Tanggulangin, Porong, Tulangan, Krembung, Popoh dan Watutulis ( Lampiran 1 ).

Mata pencaharian penduduk adalah petani yang mengerjakan tanahnya sendiri ataupun bekerja sebagai buruh pada perkebunan milik pemerintah, atau sebagian kecil hidup dari tambak ataupun perikanan. Pada awal abad XX daerah ini masih banyak terdapat tanah komunal, tanah sendiri atau gogol. Seperti pada tahun 1903 - 1904 di daerah Sidoardjo, Porong dan Gedangan terdapat tanah komunal sejumlah 22.469,25 bahu dan tanah gogol sebesar 489 ru ( Bijblad: 1904, 587 ). Selain itu jumlah peternakanpun dapat diperkirakan, misalnya di Gedangan: kuda 380, lembu 3.693, kerbau 1.581 ekor. Sidoardjo: kuda 1.727, lembu 14.294, kerbau 3.263 ekor. Daerah Prambon sebagai pembanding: kuda 1.536, lembu 15.697, dan kerbau 594 ekor.

Luas seluruh daerah Sidoardjo meliputi 639 km<sup>2</sup> terdiri 5 distrik dengan jumlah desa sebanyak 828 buah. Jumlah penduduk sebesar 257.835 jiwa yang terdiri kurang lebih 900 jiwa bangsa Eropa, 2780 Cina, 100 jiwa bangsa Timur Asing dan selebihnya bangsa pribumi. Dalam menunjang kepentingan perekonomian terdapat 2 pasar yang terhitung besar yaitu di desa Pulungan dan Kalanganjar. Di pusat kota ter -

dapat jalan kereta api jurusan Surabaya - Bangil, dan Sidoardjo - Mojokerto ( D.G. Stibbe: 1904, 770 ).

### B. Sistem Perekonomian Penduduk.

Sebagiaian besar penduduk adalah petani pemilik tanah atau sebagai buruh atau penggarap dengan sistem bagi hasil. Pola tanam adalah dua pertiga ditanami padi sedangkan sepertiganya disewa oleh pabrik tebu. Tanaman padi seperti genjah dapat dipanen dua kali dalam setahun yang dilanjutkan dengan polowijo seperti kacang rambat, atau kacang tanah, kedelai, jagung ( Overzichtskaart Der Afdelling Sidoardjo: 1904, 15 ). Tanaman padi selain dapat ditanam di persawahan juga dapat di tanam di pategalan. Masa tanam, pewinihan pada bulan Oktober - Nopember, padi ditanam bulan Nopember - Desember - Januari. Kemudian tahap kedua mulai bulan Maret - April - Mei dan Juni sudah panen. Dari bulan Juni akhir - Juli - Agustus - September dapat di pergunakan untuk tanaman polowijo.

Tanaman kacang tanah sangat disenangi oleh penduduk dari pada tanaman polowijo yang lain, sebab selain cepat tumbuh tanaman ini tahan terhadap ke keringan dan daunnya dapat dipakai untuk makanan ternak. Batang dan daunnya per pikul dapat dijual seharga f. 0,05 ( lima sen ) hingga f. 0,07 ( tujuh sen ), sedangkan sisanya yang tidak terjual dibakar untuk penyubur tanah. Usaha pembudidayaan polowijo terutama jagung sebenarnya telah dimulai oleh beberapa pejabat pribumi seperti Bupati Mojokerto walaupun mengalami kegagalan. Mulai tahun 1901 produksi jagung dan ketela mengalami peningkatan dengan harga f. 15 per bahu ( Primbon Surabaya: 1901, 152 ).

Cara penanaman padi di daerah Sidoardjo bermacam - macam ragamnya, hal ini mengingat bahwa daerah itu terdiri dari sawah pengairan teknis dari Sungai Brantas, tanah rawa, tanah tegalan. Sawah dengan pengairan teratur dan tanah rawa yang mengalami penen dua kali akan mengenal sistem

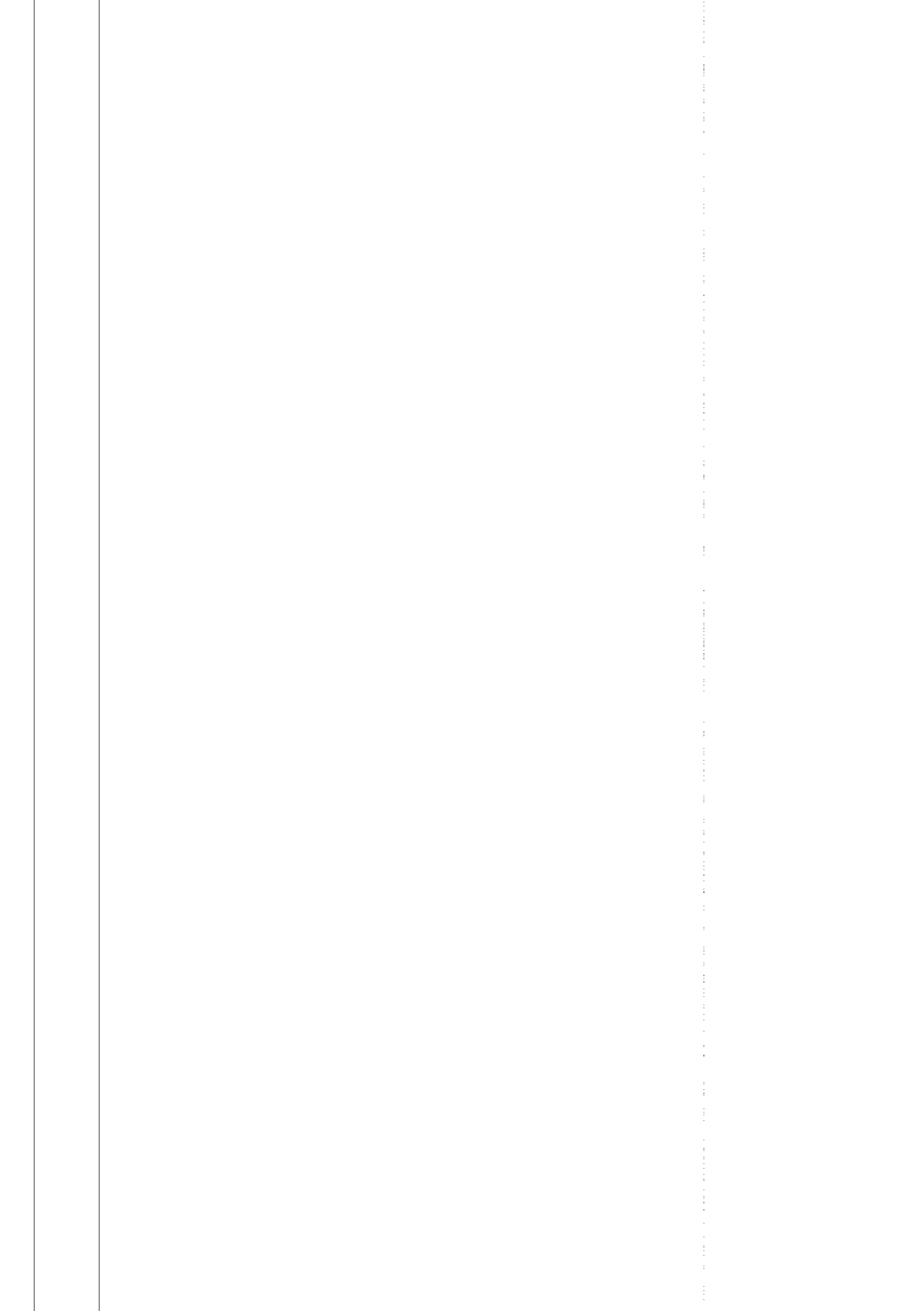
walik damen, yaitu setelah penen pertama tanah dihentikan sebentar dalam bentuk cangkulan dan kemudian ditanami lagi. Sistem ini sebenarnya sangat merugikan perkebunan tebu, sebab banyak memerlukan air untuk menggenangi sawah tersebut yang dapat mengurangi jatah tanaman tebu. Tanaman jenis padi genjah di daerah Sidoardjo sangat sedikit apabila dibandingkan dengan daerah lain,, misal di Sidoardjo hanya 8 % dan Indramayu mencapai 23 %. Harga gabah kering di musim penghujan hanya f. 54 per bahu sedangkan di musim kemarau dapat mencapai f. 140 per bahu ( H.J.W. Lawick: 1908 ).

Mengingat daerah Sidoardjo merupakan daerah perkebunan, maka hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti tukang gerobak, tukang kereta dan buruh pabrik dengan upah f. 6,00 - f. 7,00 untuk satu musim gula. Tukang gerobak banyak mendapatkan pekerjaan ketika pabrik gula mulai giling. Mereka mengangkut tebu yang telah ditebang kemudian dibawa ke pabrik gula untuk digiling.

### C. Kontrak Arends dan Dampaknya Terhadap Petani.

Mulai tahun 1899 di afdeling Sidoardjo mulai berlaku persewaan tanah oleh pemerintah atas anjuran Asisten Residen L.A. Arends, maka persewaan tanah itu lazim disebutnya "kontrak Arends". Isinya:

Bahwa penguasa asing (Eropa) bertindak sebagai penyewa, untuk waktu tertentu, atas areal sawah desa, secara bergantian penggunaannya untuk perkebunannya seluas kurang lebih sepertiga bagian dari tanah sawah tersebut, dengan pembayaran pertahun tidak kurang dari jumlah sewa sebesar pajak tanah dari semua tanah-tanah di desa ( termasuk tanah sawah, tanah tegalan, tanah pekarangan, kolam-kolam ikan dan lain sebagainya. Uang pembayaran tersebut harus diserahkan sebelumnya, disaksikan oleh gogol atau beberapa orang dari mereka kepada pengurus desa guna melunasi pajak tanah. Pembagian dalam tiga bagian yang sama dan digunakan oleh penguasa pabrik secara bergantian, pembayaran uang pajak dan pemberian uang sewa untuk tahun yang berikutnya kepada petani.





( Hoofdstuk II: 1904, 10 dan Overzichtskaart Der Afdelling Sidoardjo: 1904, 6-7 ).

Pada dasarnya ketentuan "kontrak Arends" akan lebih menguntungkan para petani dan pabrik gula. Sebab, pabrik gula dapat memperluas perkebunan tebunya berdasarkan kepastian hukum, sedangkan bagi rakyat langsung dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanah. Ketentuan lain dalam kontrak ini tanpa adanya campur tangan pihak penguasa tradisional. Namun kenyatannya peraturan ini selalu disalahgunakan oleh para penguasa tradisional itu yang pasti selalu merugikan rakyat setempat. Apalagi peraturan itu dilaksanakan dengan "perintah halus" oleh para pejabat, kepala-kepala distrik, dan pimpinan onderneming. Maka sebenarnya peraturan ini telah disalahgunakan dan terjadilah pelanggaran terhadap sejumlah peraturan hukum dalam Staatblad th. 1900 No. 240 yang berisi larangan bagi para pejabat untuk ikut campur tanpa izin resmi, serta melampaui hak tugasnya.

Dalam akta perjanjian kontrak memang tidak ada paksaan dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, itulah siasat para lurah. Sehingga lurah-lurah itu dapat hidup dengan makmur serba kecukupan, yang membuat iri para wedono. Jadi karena tingkah laku dari para penguasa pribumi inilah seolah-olah "kontrak Arends" menjadi semacam paksaan baik dari Bupati hingga ke bawah sampai lurah. Memang terjadi hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan antara penguasa pribumi dan pihak onderneming, yang disebut dengan hubungan simbiose mutualistis. Bupati, wedono, lurah selalu mendapatkan hadiah, bantuan keuangan atau bentuk yang lain dari penguasa onderneming, sebaliknya penguasa onderneming selalu membutuhkan bantuan penguasa pribumi untuk mendapatkan tanah perkebunan, tenaga kerja demi lancarnya industri gula.

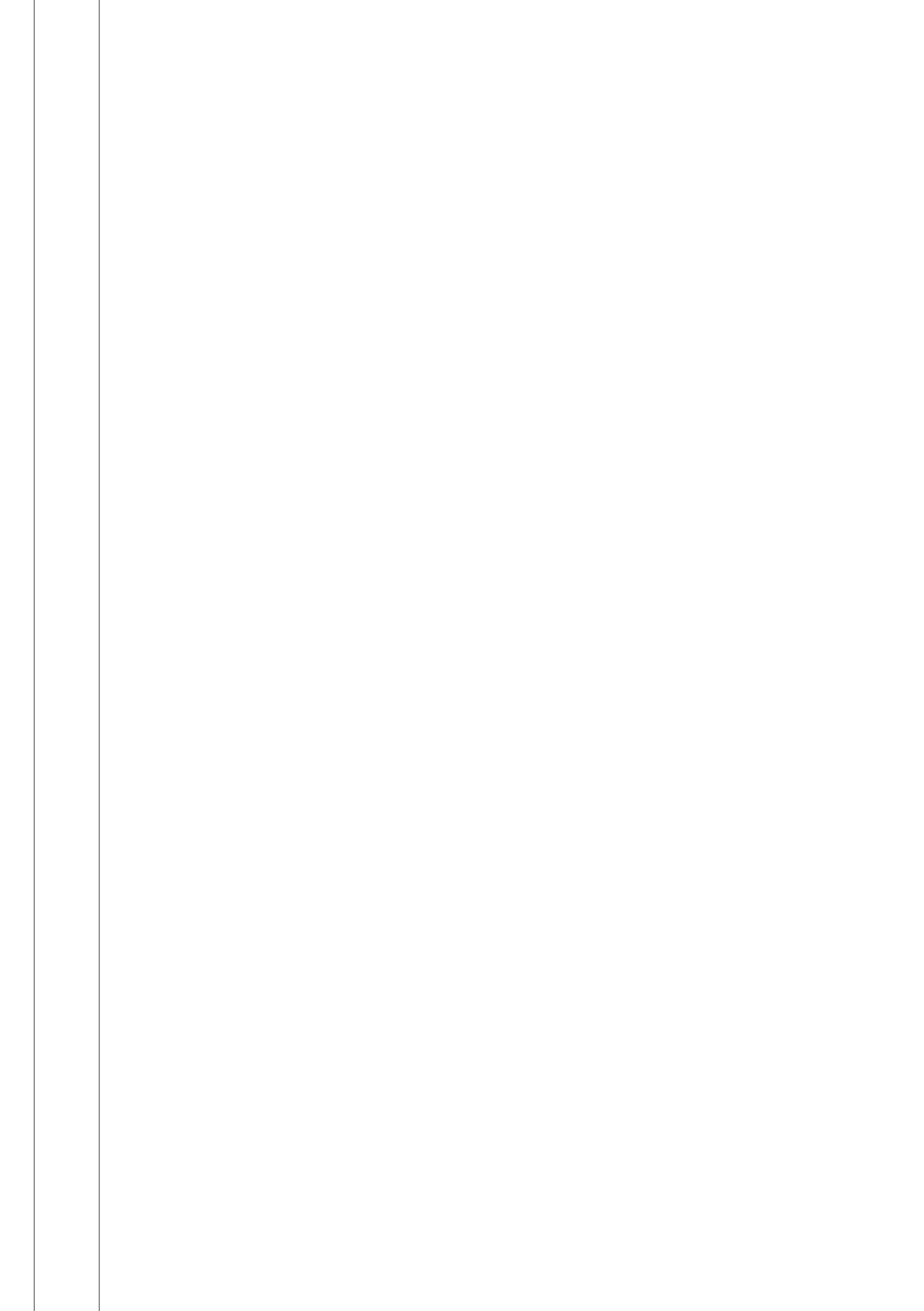
Dalam penelitian ini banyak ditemukan sumber yang mengatakan bahwa atas perintah halus dari bupati, onderneming berhasil mendapatkan tanah dan merekrut para pekerja dari

laki-laki, perempuan, hingga anak-anak yang dipekerjakan pada malam hari. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu bupati telah terlibat hutang sebesar f. 12.000 semenjak menjadi patih di Sidoarjo atau warisan hutang dari ayahnya. Di samping itu akibat perkawinannya yang ke dua dengan putri Aryo Mataram dari Surakarta, yang harus menjual harta kekayaan dan bantuan dari onderneming. Secara otomatis pejabat itu telah terjerat dalam ikatan finansial dari pihak pabrik yang berarti harus melayani kepentingan barat dari pada kepentingan pribumi ( Ass. Residen Brebes: 1904, Bijlage XXV ). Selain itu bupati menjalin hubungan erat dengan beberapa kepala onderneming Popoh, Watutulis, Krebung dan Ketegan. Bupati memang telah mendapatkan bantuan finansial dari kepala-kepala pabrik itu, bahkan tunjangan tetap pada setiap bulannya. Bahkan bupati mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dan penganngkutan ketika sedang membangun masjid yang megah dari renovasi mesjid lama yang telah rusak. Ketika bupati melangsungkan perkawinan anaknya yang kedua, penguasa onderneming telah mengirim perabot termasuk mebelair yang mewah, hiasan, dan peralatan dapur seperti sendok hingga garpu makan ( J.A. van Blommenstein: 1904, Bijlage XXV ).

Wedono Porong terlibat hutang sebesar f. 4500, pada hal wedono itu merupakan tuan yang amat mahal bagi onderneming, sebab wedono itu dapat mencarikan lahan perkebunan yang amat luas. Persewaan tanah sebesar f. 60 hingga f. 70 disesuaikan dengan tanah dan pengairan untuk satu bahunya pertahun. Sisa uang seluruhnya dikurangi uang yang diberikan pada pemilik tanah pada angsuran pertama harus diberikan kepada wedono sebesar f. 15 perbahunya ( Kontrolir Pemaalang: 1904, Bijlage XXV ). Sedangkan di daerah Prambon yaitu pabrik gula: Krebung, Tulangan, Watutulis, Bulangbendo, Popoh dan Ketegan tidak pernah ada keluhan mengenai persewaan tanah dan pekerjaannya, namun keluhan itu mengenai tingkah laku lurah yang sering melanggar kontrak.

Menurut J.A. van Blomenatein seorang bekas kontrolir di Prambon dikatakan bahwa, terdapat beberapa desa menolak untuk menyewakan tanahnya walaupun dengan cara apapun yang dilakukan oleh kepala-kepala onderneming. Mereka ingin menanamkan tanahnya dengan padi bukannya tebu. Menurut perhitungan para petani, memang lebih menguntungkan apabila ditanami sendiri dari pada disewa oleh pabrik. Petani akan mendapatkan untung dalam ujud uang sebanyak f. 100 - f. 150 per bahu dalam satu tahun. Setelah disewakan pada pabrik pendapatan uang yang mereka terima hanyalah f. 25 atau paling banyak sebesar f. 30 per bahu dalam setahunya. Sehingga yang f. 120 terpaksa dimakan oleh mesin pabrik. Seperti di bawah ini keluhan dari para petani:

- a. seandainya anak bumi putera tiada seorangpun yang mau menyewakan tanahnya kepada tuan pabrik tiada bisa meluluskan pekerjaan pabrik (giling). Maka anak bumi putera jika tanah tiada disewakan, tentu diusahakan dengan betul-betul, menurut perhitungan yang benar, sawah yang baik tanahnya jika dibandingkan dengan padi per bahu bisa mengeluarkan hasil padi 50 pikul pertahun (semusim), maka dijual bisa laku f. 120 sampai f. 150, dan sesudah panen maka ditanami palawija seperti jagung, ketela, kedelai dan lain-lain. Maka hasil palawija ini terkadang sampai f. 15 jadi untungnya dalam satu bahu tanah itu jikalau diusahakan sendiri hasilnya total f. 135. Lagi dipotong pajak sebesar 11 %, jadi masih f. 135 - f. 15 sama dengan f. 120 uang bersih. Iuran penjagaan lain seperti jaga gardu, patroli kampung dan lain sebagainya masih dapat dijalani sendiri. Apalagi dalam penjualan agak sabar, harga akan tinggi.
- b. harta maksimal bilamana tanah disewa oleh tuan pabrik dalam satu tahun per bahu hanya f. 25 sampai f. 30. Nah sekarang uang f. 30 kita umpamakan sawah, maka kita memproseskan uang itu dalam satu tahun, misalnya untuk modal berdagang, kita pinjam-pinjamkan dengan pungutan bunga dan lain-lainnya. Bilamana uang yang kita pinjamkan yang f. 10 maka bunganya sebesar f. 2 dalam satu bulan (ini aturan luar), kemudian f. 30 bunganya f. 6 dalam 1 bulan dan 12 bulan x f. 6 = f. 72. Pokok f. 30 + f. 72 = f. 102 dalam satu tahun.



Tanah sawah yang disewa tuan pabrik di atas sesudah tanaman tebu dipotong orang yang menyewakan juga boleh jikalau hendak menanam palawija (menurut perjanjian kontrak) dan hasil palawija ini sebesar f. 15, maka keseluruhan hasil f. 102 + f. 15 = f. 117.

( Primbon Surabaya: 1901, No. 152 ).

Bilamana tanah dikerjakan sendiri yang jelas masih terdapat keuntungan antara f. 75 sampai f. 120. Pendapatan yang seharusnya untuk petani, setelah disewakan pada pabrik, tidak menjadi hak petani. Akibatnya jelas bahwa kehidupan petani di sekitar perkebunan tebu dan pabrik gula akan tetap miskin. Proses kemiskinan yang digambarkan sebagai akibat di "hisap" oleh mesin-mesin pabrik pada awal abad XX di Hindia Belanda, sebenarnya telah menggambarkan juga hubungan pengertian dengan proses lahirnya kapitalisme di dunia barat. ( Immanuel Wallerstein: 1983, 13-43 ).

Hubungan antara perkebunan tebu dan pabrik gula dengan masyarakat pribumi, memasuki awal abad XX nampak mulai tidak lancar termasuk di daerah Sidoardjo. Ketidak harmonisan ini sering dilampiaskan dengan cara membakar perkebunan tebu, sebab mereka sering diperlakukan tidak semstinya oleh para penguasa di wilayah itu ( Tijdschrift voor Het Binnenlandsch Bestuur: 1904, Deel 1-6 ). Kebakaran biasanya sering terjadi di akhir musim giling yang dilakukan oleh para kusir gerobak untuk memaksa pengusaha pabrik untuk segera giling. Namun juga kebakaran itu dilakukan karena ingin membalas dendam kepada para mandor, karyawan pribumi yang bekerja di pabrik, kepala desa, kepala kampung, atau penjaga perkebunan tebu.

Menurut sumber tertulis, bahwa pada tahun 1902 telah terjadi kebakaran sebanyak 183 kali, pada tahun 1903 terjadi sebanyak 146 kali. Dari berbagai kebakaran pada tahun 1902 dan 1903 dapat diketahui alasannya bahwa: sakit hati kepada petinggi atau kepala desa dan pembantunya sebanyak

23 kali, sakit hati kepada kepala kampung atau anggota pemerintah 6 kali, sakit hati kepada opas tebu atau kemit 36 kali, marah terhadap mantri polisi tebu 1 kali, sakit hati pada polisi pemerintah 12 kali, marah kepada mandor atau karyawan pabrik pribumi 7 kali, marah dan sakit hati pada karyawan pabrik bangsa Eropa 5 kali, sakit hati pada pengusaha pabrik 1 kali pembakaran dilakukan agar tanahnya yang disewakan segera kembali, karena anggapan penyebab penyakit gatal-gatal karena daun tebu kering 1 kali, saling bermusuhan 8 kali, tidak disengaja 3 kali, sebab yang tidak diketahui sebanyak 2 kali.

Melihat gambaran di atas, terdapat 14 kategori tindakan pembakaran tebu. Kategori pertama yaitu sakit hati dan marah kepada opas tebu atau kemit adalah faktor yang utama, marah dan sakit hati serta dendam kepada petinggi dan para pembantunya menduduki urutan ke dua, sakit hati dan marah atau dendam terhadap karyawan pabrik atau pengusaha pabrik menduduki urutan ketiga.

Faktor utama dari penyebab kemiskinan para petani di daerah Sidoarjo tidak hanya hadirnya "kontrak Arends" melainkan masih terdapat faktor lain yang menyebabkan para petani berada diambang kemiskinan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Beban pajak yang berat.

Pajak tanah rata-rata sebesar 11 % per bahu dalam setahun. Di Prambon pajak sebesar f. 9 hingga f.10 bahkan naik menjadi f. 12 per bagian gogol setiap tahunnya akan dirasa berat. Pajak yang lain berupa pajak ternak, penyembelihan hewan, pajak perikanan dan transportasi. Pajak atas pemotongan hewan, seperti sapi, kerbau dan kuda di Sidoarjo sebagai berikut: pada tahun 1899 sebesar f. 31.778 , tahun

1900 f. 34.788 , 1901 f. 33.011 , 1902 f. 33.901 , dan pada tahun 1903 sebesar f. 33.175. Pajak kolam ikan, dan pajak kereta roda dua sebesar f. 12. Pajak perorangan untuk setiap kerja rodi sebesar f. 1 ( J.A. van Blomenstein: 1904, Bijlage XXV ).

2. Terjerat rumah gadai atau lintah darat.

Karena pajak dirasa amat berat maka petani kadang-kadang lari kerumah gadai dan lintah darat, atau rela perabot rumah tangganya disita oleh lurah sebagai penarik pajak. Anehnya para lintah darat ini dilakukan oleh para haji, hal ini dapat kita lihat di daerah Babadan dan Ginonjo distrik Porong seorang pribumi bernama H. Kadir telah menyewa tanah sejumlah 413 bahu, dan H. Abdurrachman sebanyak 368 bahu. Harga sewa tanah di musim hujan rata-rata antara f. 20 - f. 35 , di distrik Krian antara f. 20 - f. 40. Para lintah darat ini biasanya menggunakan para benggol untuk menagih hutang yang diberikan pada petani.

3. Lahan semakin sempit.

Seharusnya ada ketentuan pembatasan perluasan penyewaan tanah bagi pabrik gula di Sidoardjo. Hal ini menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian di daerah itu. Jumlah penduduk yang padat dan kurangnya lahan pertanian akan berakibat berat bagi pemerintah. Sejak berlakunya "kontrak Arends", maka perkebunan tebu terus meluas karena tetap mendatangkan keuntungan bagi pabrik, walaupun harga gula di pasaran dunia menurun.

4. Petani terjerat oleh pabrik.

Biasanya seorang yang telah berani menyewakan tanahnya kepada pabrik untuk tanaman tebu, akan

sangat sulit terlepas dari kontrak sewa karena tindakan sejumlah aparat pabrik yang bekerja sama dengan aparat birokrasi kolonial, dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Apabila tanah itu dapat kembali kepada petani, biasanya tanah itu dalam keadaan rusak. Hanya melalui kerja keras maka areal yang telah ditanami tebu akan dapat menjadi sawah. Hasil budidayapun akan berkurang. Sebab padi yang ditanam bekas areal tebu hanya lebat daunnya, tetapi hasilnya sangat sedikit. ( Bijlage XXV ).

Di wilayah Gedangan semenjak tahun 1903 tentang per-sewaan tanah mengalami kenaikan uang sewa, namun kenaikan itupun tidak nampak menguntungkan para petani. Sebab pelaksanaan jangka waktu kontrak juga diperpanjang menjadi 3 tahun dan uang muka itu dibayarkan di muka, karenanya petani tidak bisa mengendalikan uang itu dan segera akan habis sehingga mereka menjadi kuli dengan hidup yang serba susah. Model pembayaran uang semacam itu tidak akan menolong para petani untuk dapat dikatakan makmur. Menurut kebiasaan apabila setelah kontrak itu diperpanjang dan kenyataan justru semakin berlarut-larut, maka para petani terpaksa merelakan sawahnya dibeli oleh pabrik atau jatuh ke tangan lintah darat dengan harga murah. Dalam hal ini nampak peran broker sangat dominan dan biasanya yang semakin kaya adalah para lurah, sehingga sering menimbulkan iri hati atasannya. Di Gedangan landrente atau pajak tanah untuk seluas setiap bahu sebesar f. 10 yang ternyata lebih rendah apabila dibandingkan dengan daerah Porong yang sebesar f. 11,99. Pajak berupa uang ini sebenarnya dalam masyarakat petani yang tidak memiliki uang adalah kurang cocok, mereka lebih senang pajak dipungut dalam ujud padi atau inatura.



Pembaharuan "kontrak Arends" dan uang sewa dibayarkan pada bulan Nopember atau Desember, pada saat itulah banyak para petani yang sedang membutuhkan uang karena petani paceklik setelah kemarau panjang, sedangkan padi belum dapat dipanen. Perhatian laki-laki hanya tertuju di sawah, padahal uang sangat diperlukan, sehingga sering terlihat baju terakhir milik suami atau kain dada (kemben) dan selendang milik isteri berpindah ke rumah gadai. Pajak tanah dibayar paling lambat tanggal 20 Desember, akan tetapi pada bulan Nopember para kepala desa sudah bertindak dan siapa yang tidak dapat melunasi pajaknya, maka tidak ragu-ragu akan diangkut semua perabot rumah bahkan rumah petani itu untuk dijual. Dalam keadaan semacam itu industri gula memainkan peranan penting sebagai "bank" dengan peraturan yang lebih ringan apabila dibandingkan meminjam dari lintah darat. ( H.J.W Lawick: 1908 ).

Akibat perluasan areal perkebunan tebu tidak dibatasi mengakibatkan lahan pertanian menjadi sempit. Di wilayah Gedangan tanah milik gogol yang jumlahnya sekitar 1.744.950 m<sup>2</sup> jumlah yang nyaris memakan hampir 93,04 % dari luas distrik Gedangan secara keseluruhan. Perkebunan tebu yang seluas 1600 bahu apabila sudah dikurangi biaya untuk biaya pekerja, pengolahan hasil, transport, pembelian material, sebesar kurang lebih f. 350.000. Hasil yang diperoleh sebesar tiga kali dari pengeluaran, di luar pajak. Menurut pertungan kehadiran perkebunan tebu di Jawa, maka dapat dinyatakan bahwa industri gula telah dapat memberikan keuntungan f. 21,5 juta dalam setahun. Namun apa maknanya menurut seorang ahli Hindia Belanda, sebagai berikut:

Tanpa berlebihan dapat dikatakan bahwa industri gula dapat dianggap sebagai tulang punggung yg menyangga segalanya, yang memberi kehidupan dan usaha pada lalu lintas di Jawa, karena kalau

industri itu jatuh, maka semua yang erat hubungannya akan jatuh pula, kereta api, semua lalu lintas angkutan di daratan atau di laut, yayasan bank dan kredit, bagian besar dari perdagangan barang import, jalur pelayaran kapal api, dengan satu kata iawa akan menjadi kolonial miskin ...

( Pidato dari Dr. Sollewijn Gelpe. 1890 ).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa industri gula memang sangat menghasilkan dan merupakan tulang punggung perekonomian Belanda, namun yang menjadi korban adalah rakyat karena kurangnya tegaknya peraturan dan ulah para penguasa tradisional. Seumpama perkebunan tebu dan industri gula benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Jawa, terutama bila diterapkan pada masyarakat Sidoardjo, maka akan terlihat bahwa perekonomian rakyat di daerah itu hanyalah bersifat semu, karena penghidupan masyarakatnya lebih ditentukan oleh nilai kredit. Pada umumnya penduduk di tempat itu sebagian besar miskin dan berhutang pada onderneming yang ada.

Kenyataan di atas diperkuat oleh seorang kontrolir yang pernah bertugas di daerah Prambon, yang berisi penjelasan tentang daerah yang begitu banyak pabrik gulanya sebagaimana yang ada di Sidoardjo. Ia menerangkan bahwa keadaan ekonomi rakyatnya tidak baik apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di sekitar Surabaya. Kehadiran perkebunan tebu dan pabrik gulanya sangat berpengaruh terhadap pejabat-pejabat pribumi, kepala-kepala desa dan rakyat, dari apa yang disebut "kontrakArends". Menurut kontrolir itu yakin, meskipun industri gula itu dapat memberikan uang yang banyak kepada masyarakat namun ternyata juga merupakan malapetaka. Kebahagiaan tidak ada, apalagi kesejahteraan, bagaimana dikatakan bahagia dan sejahtera jika secara terus-menerus sepertiga dari tanah mereka disewa oleh pabrik. Saat panen hanya mendapatkan hasil sedikit, beberapa bulan

setelah panen tidak lagi memiliki persediaan padi. Mereka harus puas dengan makan ketela setiap hari yang mereka beli dari hasil bekerja sebagai kuli di pabrik atau perkebunan tebu. Martabat gogol atau pemilik tanah merosot derajatnya, semula sebagai petani merdeka dengan ekonomi yang dapat menjamin kehidupannya setelah ada pabrik gula berubah menjadi kuli yang hidupnya serba kekurangan.

Demikian akibat dari sistem sewa tanah yang lazim disebut dengan "kontrak Arends" yang melibatkan sejumlah pejabat yang tidak sesuai dengan peraturan dalam Staatblad Tahun 1900, No. 240 yang masih tetap berlaku. Akibat campur tangan para pejabat, khususnya kepala desa akan merupakan bentuk tekanan sebagai "perintah halus" yang juga mengakibatkan pada kemiskinan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kontrak Arends adalah sebuah istilah yang berarti perjanjian sewa-menyewa tanah untuk kepentingan perkebunan tebu dan pabrik gula atas anjuran Residen Surabaya L.A Arends. Pada dasarnya isi dan tujuannya baik membantu petani dalam membayar pajak, namun peraturan tersebut selalu disalah gunakan oleh para penguasa tradisional terutama lurah. Para penguasa tradisional ini sebagai pemeras ganda yang tentu saja makin menambah penderitaan petani.

Hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gulanya berarti merusak sistem ekonomi di daerah sekitarnya dan tidak jarang berakibat buruk bagi masyarakat sekitarnya. Wabah kemiskinan ini timbul akibat terjadinya krisis ekonomi serta terhentinya sistem administrasi kekuasaan karena berbagai bentuk ketegangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Hadirnya penetrasi kolonial menjadikan kondisi masa transisi karena terobeknya struktur sosial masyarakat tradisional akibat eksploitasi di bidang kehidupan ekonomi masyarakat melalui bentuk produksi agraris. Eksploitasi ini terjadi setelah rumah tangga desa terbuka untuk melakukan kontak dengan sejumlah konsep barat. Kontak tersebut mengharuskan budaya masyarakat pedesaan berhadapan dengan budaya barat, sehingga terjadi pengkoyakan budaya pertanian tradisional masyarakat pedesaan akibat penetrasi budaya barat.

Ekonomi pasar yang semula hanya bersifat lokal dan subsistensi harus bersinggungan dengan perekonomian dunia yang bersifat kapitalistik.

## B. Saran-Saran

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka dalam saran-saran ini peneliti berusaha menarik benang merah pengalaman pada waktu itu untuk di - proyeksikan pada masa sekarang dan yang akan datang. Maksudnya, pengalaman masa silam diharapkan dapat dipakai sebagai penentu kebijaksanaan oleh para bi - rokrat terutama bilamana menangani masalah persewaan tanah untuk perkebunan tebu. Banyak saran yang masih relevan untuk masa kini antara lain:

1. Tegakkan peraturan dari atas hingga bawah untuk tatap menjaga kewibawaan pemerintah, shg kasus kontrak Arends tidak terulang kembali.
2. Perbaiki harga sewa dan perlunya pembatasan perluasan sehingga tidak mendesak lahan pertanian yang akan merugikan petani.
3. Meningkatkan taraf hidup rakyat dan jangan sampai jatuh ke tangan lintah darat, atau rumah gadai.
4. Menghilangkan penindasan, seperti kerja rodi, pemberian premi, uang muka, pajak berat.
5. Pengembalian tanah penduduk yang idsewa dalam ke - adaan baik, misalnya tepat waktu, pemberian ganti rugi.
6. Menghindari rekruting tenaga kerja anak-anak, dan perbaiki upah kerja serta pikirkanlah tentang keselamatan kerja.
7. Sebaiknya untuk pekerja wanita dilakukan pada siang hari.
8. Pemberian santunan kepada buruh bilamana mendapat kecelakaan.
9. Mawas diri.

## BAB I

1. Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism, London: Verson Edition, 1977. hlm. 74-75.
2. W.F Wertheim, East-West Parallel: Sociological Approach to Modern Asia. The Heague: W.van Hoeve Ltd. 1964.
3. Anne Both dan William J.O' Malley, Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1988. hlm. 197.
4. G.J Resink, Indonesia's History Between the Myths. The Heague: Martinus Nijhoff, 1968. hlm. 103 - 105.
5. S. Sigit Wahyudi, Dampak Agro Industri Di Daerah Persawahan di Jawa: Studi Kasus Gedangan 1904. Yogyakarta: UGM, 1993. hlm.4. Thesis yang tidak diterbitkan.
6. Loekman Soetrisno, "Kapitalisme Perkebunan dan Modernisasi di Indonesia" makalah seminar bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, Yogyakarta 3 April 1986. hlm. 3-4.
7. James C. Scoot, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 1983.
8. Yijiro Hayami dan Masao Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Ke - lembagaan di Asia. Jakarta: Yayasan Obor, 1987. hlm. 183-244.
9. Karl J. Pelzer, "The Agrucultural Foundation" dalam Bruce Glassburner, (ed)., The Economy of Indone- sia. Ithaca and London: Cornell University Press 1971. hlm. 128-161.
10. S. Sigit Wahyudi, op. cit., hlm. 40-100.

## BAB II

11. Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Dokumen" dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1991. hlm. 45-47.
12. Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Jakarta: UI, 1986. hlm. 35.
13. Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979. hlm. 10-14.

## BAB III

14. Lampiran 1.
15. Lampiran 1.
16. W.C Dickhoff, "Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikan- ten op Java" dalam Bijblad van Den 13 den Jaar - gang (Uitgege- ven door Het Archief voor de Java- Suikerindustrie), 1904. hlm. 587.

17. D.G Stibbe, E.N.I, Leiden: 'S-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1904. hlm. 770.
18. Overzichtskaart Der Afdelling Sidoardjo. Batavia: 1904. hlm. 15.
19. Primbon Surabaya. Hari Jumat 5 Juli 1901. No. 152.
20. H.J.W Lawick, Gerakan Melawan Industri Gula di Hindia Belanda. 1908. Pentuk Pidato.
20. Hoofstuk II, 1904. dan Overzichtskaart Der Afdelling Sidoardjo. Batavia, 1904. hlm. 6-7.
21. "Nota dari Ass. Residen Erebes 25 Juli 1904" Bijlage XXV.
22. J.A van Blommenstein seorang Kontrolir Cipanas di Ciputri, 4 Oktober 1904. Bijlage XXIV.
23. "Nota dari Kontrolir Penalang. 25 Juli 1904" Bijlage XXIV.
24. Primbon Surabaya. op.cit.
25. Immanuel Wallerstein, op.cit., hlm. 13-43.
26. Tijdschrift voor Het Biunenlandsche Bestuur, 1904. Deel I-6.
27. J.A van Bommenstein, 1904. Bijlage XXV.
28. Ibid.
29. H.J.W Lawick, 1908. op.cit.
30. Pendapat dari Dr. Sollewijn Gelpe, Anggota Komisaris Kesejahteraan Rakyat Pribumi. 1890.